

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada masa ekonomi tradisional hanyalah diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Gross Nasional Produk (GNP), baik secara keseluruhan maupun per kapita. Dengan pertumbuhan GNP ini diyakini dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect*. Sedangkan pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GNP semata tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2000).

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan dan harus segera mendapatkan penanganan agar dapat segera teratasi. Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak tentunya tidak dapat dihindari lagi oleh masalah kemiskinan. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia dan yang sangat terlihat oleh kasat mata yaitu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sendiri yang mana adalah sebuah daerah perkotaan dan Ibu kota

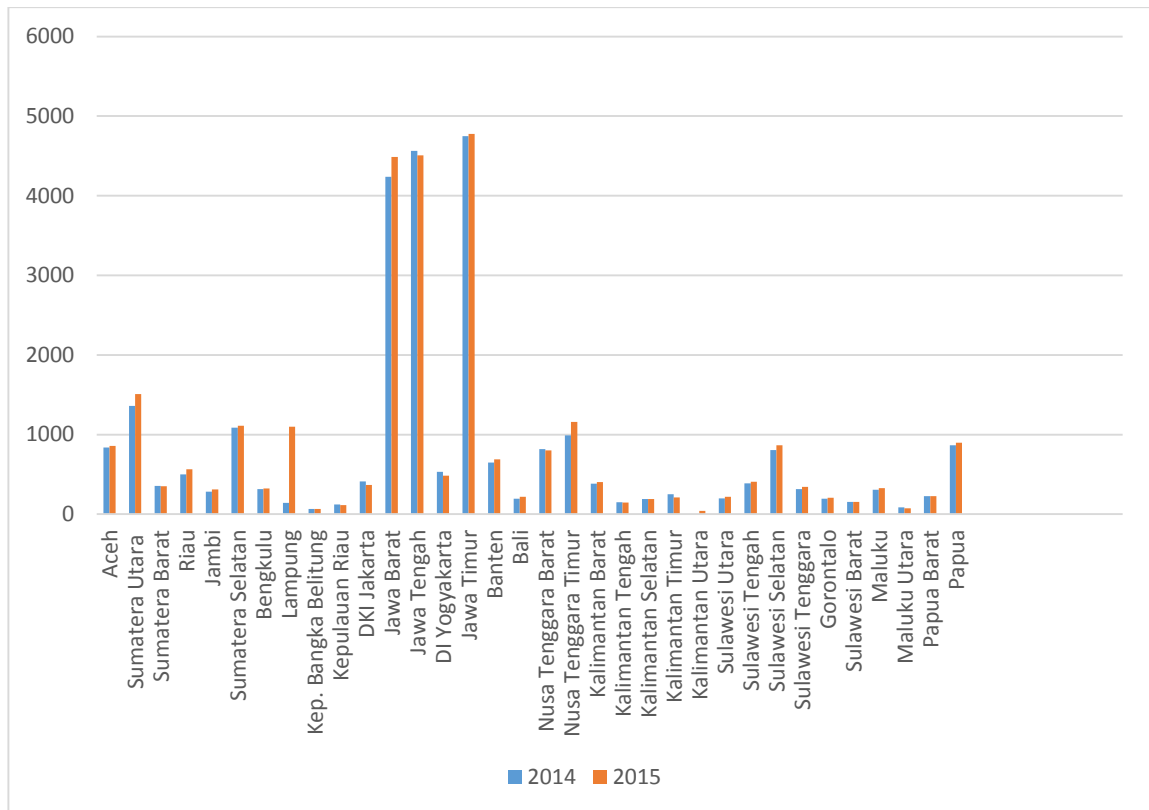
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk paling padat tingkat provinsi di Indonesia dengan jumlah 15328 (jiwa/km²).

Banyak orang yang migrasi ke Jakarta demi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun mayoritas di pedesaan sangat banyak di temukan masyarakat miskin yang tidak jauh beda jumlahnya dengan di kota besar seperti daerah DKI Jakarta. Kemiskinan ialah seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di karenakan berbagai penyebab salah satunya adalah tingkat pengangguran di suatu daerah.

Berbagai kegiatan pembangunan Nasional di lakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah di tetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka nasional (Musa, 2014). Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu indikator utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta memang tidak sebanyak provinsi lain di Indonesia dengan Jumlah kemiskinan yang lebih tinggi, namun jika dikomparasi dengan rasio populasi penduduk, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Terlebih kondisi planologi DKI berbeda karena hampir seluruh wilayahnya tergolong perkotaan dan provinsi lain di Indonesia masih memiliki wilayah pedesaan dan menjadi kawasan dominan.



GAMBAR 1.1
Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa DKI Jakarta menduduki posisi sebelas untuk jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 368.67 ribu orang (3,6%). Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 412.79 ribu orang (4,09%), jumlah penduduk miskin turun 44,12 ribu orang atau turun (10,7%).

Tingginya tingkat kemiskinan di DKI Jakarta menarik minat peneliti untuk meneliti tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta. Faktor-faktor yang di duga sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di DKI Jakarta ialah: (1) Jumlah penduduk; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka; (3) Tingkat Penduduk; (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (5) Produk Domestik Regional Bruto.

Pembangunan manusia di Negara dunia ketiga seperti Indonesia lebih diorientasikan sebagai upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin karena asset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka (lanjouw dalam Ginting, dkk 2008).

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pada tabel 1.1 akan di jelaskan presentase penduduk miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Data mengenai penduduk miskin menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta Tahun 2009-2014 ditunjukkan oleh tabel 1.1 sebagai berikut:

TABEL 1.1
Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota DKI Jakarta Tahun 2009-2014

Kabupaten/Kota Adm.	Presentase Penduduk Miskin (%)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kepulauan Seribu	12,66	13,07	11,53	11,62	11,01	13,8
Jakarta Selatan	3,52	3,80	3,43	3,49	3,47	3,80
Jakarta Timur	3,42	3,40	3,06	3,12	3,10	3,40
Jakarta Pusat	3,68	3,97	3,56	3,72	3,70	3,97
Jakarta Barat	3,44	3,82	3,44	3,47	3,46	3,82
Jakarta Utara	5,34	5,34	5,07	5,14	5,30	5,62

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten/Kota kepulauan seribu dengan persentase kemiskinan 12,66 % di tahun 2009, sedangkan di Jakarta Selatan pada tahun 2010 persentase kemiskinan sebesar 3,80% lalu di tahun 2011 sempat turun menjadi 3,43% dan di tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 3,80%. Tahun 2010 dan 2014 mengalami peningkatan menjadi 3,80%. Tahun 2010 dan 2014 Jakarta Timur mengalami peningkatan yang sama sebesar 3,40%. Jakarta Pusat peningkatan kemiskinan tahun 2010 dan 2014 sama sebesar 3,97%, Jakarta Barat peningkatan kemiskinan terjadi pada tahun 2010 dan 2014 sebesar 3,82% dan Jakarta Utara sebesar 5,62% untuk tahun 2010 dan 2014.

Struktur perekonomian provinsi Jakarta menurut lapangan usaha selama semester 1 tahun 2015 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu : perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (16,75%), industri pengolahan (13,93%), konstruksi (13,22%) dan jasa keuangan (10,11%). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Terdapat pendapat bahwa pertumbuhan yang cepat berakibat buruk terhadap

kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan ekonomi. Pendapat lain mengatakan bahwa konsentrasi penuh untuk pengentasan kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah akan habis untuk penanggulangan kemiskinan sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan melambat (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk disetiap golongan masyarakat miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan harus menyebar di berbagai sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau yang padat karya.

Selain itu, masih banyak faktor pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah negara. Seperti tingkat pengangguran, dimana angkatan kerja semakin banyak dan pertumbuhan lapangan kerja melambat. Dampaknya semakin banyak pengangguran di negara berkembang dan jumlah penduduk di perkotaan semakin bertambah tiap tahunnya sehingga menimbulkan persaingan di kalangan masyarakat.

Tingkat kehidupan yang rendah ini dimanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk pendapatan yang rendah (kemiskinan/kemeralatan), fasilitas perumahan yang tidak memadai, sarana kesehatan yang buruk,

pendidikan terbatas atau tidak berpendidikan sama sekali, tingkat kematian bayi yang tinggi, umur pendek dan harapan kosong, dan pada umumnya perasaan kacau dan putus asa (Todaro, 1978).

Sebagai ibu kota Negara, Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian sekaligus menjadi pusat kemiskinan dan pengangguran. Pusat perekonomian dan kemiskinan ini bagai dua sisi mata koin yang tidak bisa di lepaskan. Tingkat pengangguran di perkotaan terlebih di provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian, menunjukkan bahwa yang pengangguran di DKI Jakarta itu yang tidak melanjut ke jenjang kuliah sebagian besar dari mereka ekonominya kelas menengah hingga ke bawah. Tingginya tingkat pengangguran diakibatkan ingin bekerja sesuai dengan pendidikannya dan kurangnya lapangan kerja serta daya saing yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2002) menjelaskan secara umum mengenai faktor-faktor yang berpengaruh kemiskinan perprovinsi di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (terdiri dari pendapatan perkapita angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi, kondisi politik, dan populasi penduduk.

Penelitian yang dilakukan Saputra dan Mudakir (2011) menunjukkan hasil mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kemiskinan, kemudian IPM dan Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja tetapi kemampuan Negara berkembang terutama DKI Jakarta dalam menambah kesempatan kerja sangatlah terbatas. Berdasarkan latar belakang di atas untuk lebih lanjut penelitian ini akan mengajukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2015”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang terkait dalam penelitian ini dibatasi mengenai pembahasan yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang menjadi instrument dan objek penelitian antara lain adalah Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran yang digunakan adalah data di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa konteks pembahasan yang menjadi inti pembahsan penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di DKI Jakarta?

2. Bagaimana pengaruh Tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan pada provinsi di DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Dari adanya pembatasan dan perumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai capaian yang diharapkan dalam pembahasannya, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta.
2. Menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada provinsi di DKI Jakarta.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Bagi penulis secara khusus, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang

penulis peroleh dari bangku kuliah pada program S1 jurusan Ilmu Ekonomi.

- b. Bagi Akademisi penelitian ini akan menambah wawasan kepada para akademisi tentang faktor pengaruh serta perbedaan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kemiskinan di Provinsi.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat di ketahui faktor-faktor yang perlu di pacu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.